HARIAN
UNTUK UMUM

TERBIT SEJAK
01 MARET 2011

PENDIRI:
Ardi, S.Si, Apt

BUTON, BUTENG, BUSEL, BUTUR, WAKATOBI, MUNA, MUBAR, KOLAKA
BOMBANA, KENDARI, BAUBAU

Baubau Post

Baubaupost.com

KORAN NOMOR SATU DI KEPULAUAN BUTON

JUMAT
15 November 2024

Eceran Rp 5000 | Berlangganan Rp 100.000/ bulan | Info Langganan dan Iklan HP/WA: 082160543989

Menuju Kota Sehat 2025, Tantangan Sinergitas dan Kolaborasi

Pj Sekda Baubau La Ode Aswad pimpin FGD Kota Sehat 2025

Laporan: ARDI, Baubau Post, Durasi Times

BAUBAU, BP-Dalam menyambut penilaian lomba kota sehat tahun 2025 mendatang, Pemkot Baubau menggelar FGD koordinasi pembinaan penyelenggaraan kota sehat tingkat Kota Baubau tahun 2024 yang dipimpin oleh Pj Sekda Kota Baubau La Ode Aswad, S.Sos, M.Si di aula PO5 Bappeda Selasa (12/11/2024). Menurut La Ode Aswad, pembinaan Kota Sehat bukanlah kegiatan yang baru dan pastilah punya catatan tentang Kota Sehat di 2023, apa yang belum sempurna di tahun 2023 diperbaiki di tahun 2024

. Menurut La Ode Aswad, Kota Sehat merupakan apresiasi dari pemerintah pusat dalam bentuk intensif fiskal dan itu yang dikejar. Karena salah satu parameter keber-

Lanjutkan ke Hal: 7

Tito Sebut KPUD Sumber Konflik Pilkada, Banyak Orang Titipan

Mendagri Tito Karnavian mengatakan sebagian besar sumber konflik pilkada berasal dari ketidaknetralan KPUD.

Laporan: Ardi

JAKARTA- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan sebagian besar sumber konflik pilkada berasal dari ketidakn-

Lanjutkan ke Hal: 7

Pemkot Baubau Raih Peringkat Bergengsi Pada NCE ke-8

Laporan: Kasrun

BAUBAU, BP-Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Baubau berhasil masuk pada Top 10 instansi pada National Cyber Exercise (NCE) ke-8, yang diselenggarakan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada 9-12 September 2024 di Kuta Paradiso Hotel, Bali. Acara ini diikuti oleh 609 peserta dari 188 instansi/Lembaga. Dan yang membanggakan Pemkot Baubau meraih peringkat 7.

Kadis Kominfo Kota Baubau H Andi Hamzah Machmud, S.Sos, M.Si dalam keteran-

Lanjutkan ke Hal: 7

Dio Aldiansyah Terpilih Sebagai Ketua KONI Baubau Periode 2024-2028

Laporan: Hengky TA

BAUBAU, BP - Berdasarkan Musyawarah Olahraga Kota Luar Biasa (Musorkotlub), yang dilaksanakan di salah satu Hotel di Kota Baubau, Selasa 12 November

Lanjutkan ke Hal: 7

APK dan APS di Baubau Segera Ditertibkan

Pewarta: Lisna

BAUBAU, BP-Menyikapi banyaknya laporan masyarakat ke Pemkot Baubau maupun ke KPU terkait Alat Peraga Kampanye (APK) dan Alat Peraga Sosialisasi (APS) Pilkada, Pemkot Baubau menginisiasi rapat koordinasi dengan mengundang KPU dan Bawaslu Kota Baubau serta Desk Pilkada dan beberapa OPD ter-

Lanjutkan ke Hal: 7

Andina Latief, SKM
DIREKTUR

SEGENAP PIMPINAN, REDAKSI, & KARYAWAN PT FAREN GRAFIKA

PENERBIT SURAT KABAR HARIAN (SKH) BAUBAU POST (www.baubaupost.com)

Mengucapkan :

Terimakasih Kepada Dewan Pers Yang Telah Menetapkan SKH Baubau Post (www.baubaupost.com) Sebagai Media Terverifikasi per Tanggal 30 Desember 2022

Menuju Kota Sehat 2025, Tantangan Sinergitas dan Kolaborasi

hasilan disamping kesehatan Kota Baubau yang betul-betul sehat dalam arti luas yang sesuai dengan parameter yang ditentukan itu juga ukurannya adalah mendapatkan insentif fiskal. Itu artinya bahwa rekayasa intervensi Pemkot Baubau yang berkaitan dengan kota sehat ini sudah sesuai kriteria yang ditentukan oleh pemerintah pusat.

La Ode Aswad mengakui tim dan panitia di forum kota sehat tentunya sudah memahami betul apa yang seharusnya dilakukan di 2024 kemudian mempersiapkan di 2025 sehingga menjadi berkelanjutan. Bahkan, kalau melihat indikator menuju kota sehat, Kota Baubau sebetulnya sudah mengerjakannya, di semua OPD banyak program yang mengarah ke indikator kota sehat.

Pj Sekda Kota Baubau berharap pada penganggaran di tahun 2025, Bappeda lebih menukik lagi sehingga dengan terselesaikannya program di OPD maka dengan sendirinya parameter kota sehat akan terjawab. Sinergitas dan kolaborasi di tahun 2025 antar OPD sangat dibutuhkan dan menjadi penting untuk dibangun untuk memenuhi semua tatanan di 2024 ini. Di 2025 fokus pemenuhan urusan kegiatan di OPD itu terpenuhi karena dengan memenuhi belanja urusan OPD maka dengan sendirinya kota sehat terjawab karena hampir semua tatanan kota sehat itu diampu oleh OPD-OPD terkait.

â€ Yang terpenting juga bahwa kota sehat ini sangat dibutuhkan adanya inovasi karena tidak bisa lagi bekerja dengan cara-cara konvensional,â€ ujarnya.(*)

Dio Aldiansyah Terpilih Sebagai Ketua KONI Baubau Periode 2024-2028

2024 kemarin, Dion Aldiansyah terpilih Ketua Koni Baubau periode 2024-2028.

Dalam Musorkotlub Koni Baubau itu, Dion Aldiansyah perolehan 27 suara dan mengalahkan Asad ady Karim yang memperoleh 18 suara, dari jumlah total seluruh suara sebanyak 45.

Ketua Koni Terpilih periode 2024 - 2028, Dio Aldiansyah saat dikonfirmasi mengatakan, kedepan ia akan memprioritaskan kesuksesan Koni Baubau dalam mencetak prestasi prestasi Atlet yang ada di kota Baubau.

“Kita akan prioritaskan pembentukan prestasi melalui pelatihan kepada pelatih atlet dan pelatihan wasit, apa lagi sampai saat ini kebetulan saya juga masih aktif di Olahraga Basket,” jelasnya.

Lanjutnya, sudah terlihat beberapa Cabang Olahraga (Cabor) dalam kegiatan kepelatihannya namun masih ada beberapa cabor juga, yang sudah sempat berkomunikasi, terkait adanya cabor yang masih kurang pembinaan kepelatihannya baik dari tingkat Nasional hingga termasuk turnamen turnamen.

Oleh sebab itu, ia akan mendorong penuh pemenuhan kebutuhan atlet seperti anggaran dan lain sebagainya. Namun tentu, akan mengacu juga dari total medali porprov terakhir sehingga mungkin beberapa cabor cabor yang sudah aktif di tingkat Nasional, akan diprioritaskan, agar terlihat di Indonesia.

“Saya pastikan, untuk dana pembinaan akan turun di tahun ini, saya pastikan 90 persen untuk tiap cabor di Kota Baubau. Sebab, pengembangan bakat olaharaga juga harus di dukung penuh dengan kesiapan anggaran yg maksimal untuk Koni Baubau,” tuturnya.

Selain itu, terkait soal anggaran tersebut, akan mengacu pada provinsi. Dimana, ia akan berusaha membangun komunikasi yang lebih baik lagi untuk perihal anggaran Koni Kota Baubau baik melalui Koni propinsi dan para stekholder yang ada di Kota Baubau.

Ditempat yang sama, Ketua Karatecker Baubau Alam Nasrul S mengatakan, pada prinsipnya Koni Sulawesi Tenggara akan selalu mendukung dari kinerja Koni Kota Baubau ke depan, dan tentu ketua Koni terpilih merupakan hasil hasil dari pada pemilihan seluruh Cabor.

“Tentu saja diharapkan, kedepan Koni Baubau bisa bersinergi, tidak hanya saja secara organisasi tetapi juga dari segi pengembangan prestasi,” katanya.

Ia juga meminta, agar ketua Koni terpilih untuk segera melakukan dan menata administrasi yang berkaitan dengan kepengurusan. Dengan harapan, Koni Kota Baubau harus bisa mampu untuk bersinergi dengan Koni Propinsi Sulawesi Tenggara kedepan.

“Kita berharap, Koni Kota Baubau tidak hanya bersinergi secara organisasi dalam hal pembinaan prestasi,” tutupnya.(*)

Tito Sebut KPUD Sumber Konflik Pilkada, Banyak Orang Titipan

etralan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).

Tito mengungkap ada calon kepala daerah yang sudah menaruh orang sejak awal di KPUD. Hal itu dilakukan untuk mempengaruhi penyelenggaraan pemilu.

“Mohon maaf, hampir 50-60 persen persoalannya, awalnya dari KPU. Bukan KPU pusat ya, KPUD. Karena masang anggota KPU komisioner,” kata Tito pada Rakor Kesiapsiagaan dan Kelancaran Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Jakarta, Rabu (13/11).

Tito mengatakan pemilihan anggota KPUD sudah mirip pemilihan kepala daerah. Masing-masing calon berlomba menempatkan orang mereka.

Selain itu, kata Tito, hal itu juga terjadi dalam pemilihan anggota Bawaslu daerah. Dia mengatakan ketidaknetralan penyelenggara menjadi pemicu konflik di daerah.

“Bagaimana mau netral? Kalau enggak netral, aparat keamanan hanya dapat limpahan cuci piring saja,” ujarnya.

Dia meminta para penegak hukum tegas terhadap urusan netralitas penyelenggara. Tito juga berharap aparat keamanan bisa memetakan potensi konflik di daerah menjelang pilkada.

“Kemampuan memetakan oleh aparat keamanan, TNI, Polri, baik operasional maupun dari BIN, maupun intelligence-nya itu jadi kunci,” ucap Tito.(8)

APK dan APS di Baubau Segera Ditertibkan

kait serta 8 Camat yang ada di wilayah Kota Baubau. Rapat koordinasi dipimpin Pj Sekda Kota Baubau La Ode Aswad, S.Sos, M.Si didampingi Asisten III Setda Kota Baubau La Ode Darus Salam, S.Sos, M.Si serta Sekretaris Kesbangpol Kota Baubau.

Pj Sekda Kota Baubau La Ode Aswad memerintahkan penertiban APK dan APS dilakukan sekali jalan dan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Setelah pihak Bawaslu dan KPU Kota Baubau menggelar rapat koordinasi pada Jumat (15/11/2024) maka sudah langsung menentukan jadwal pelaksanaan penertiban APK dan APS. Pemkot Baubau dalam penertiban APK dan APS akan diwakili Satpol PP, DPMPTSP, Desk Pilkada dan Kesbangpol setelah menerima hasil kajian dari Bawaslu karena menjadi pedoman dalam pelaksanaan penertiban APK dan APS.

Sedangkan terkait dengan minggu tenang Pilkada Kota Baubau, La Ode Aswad mempersilahkan Bawaslu dan KPU Kota Baubau untuk melaksanakan penertiban APK. Sementara Camat dan Lurah menunggu apa yang harus dikerjakan pada minggu tenang nanti.

Kemudian yang berkaitan dengan netralitas ASN sesuai laporan yang viral di media sosial, Pemkot Baubau ungkap La Ode Aswad masih tetap menunggu hasil penelusuran dari Bawaslu yang hasilnya akan disampaikan ke Pemkot Baubau. â€ Mari tingkatkan kerja kolaborasi antara Desk Pilkada dengan penyelenggara sehingga penyelenggaraan Pilkada di Kota Baubau Damai,â€ ungkapnya.

Sementara itu, anggota KPU Baubau Samsudin mengakui, APK dan APS yang dipasang pada beberapa tempat ada yang tidak sesuai dengan titik yang ditentukan. Disamping itu, juga mengganggu aktifitas masyarakat.

Ditempat yang sama, Ketua Bawaslu Kota Baubau Sarmin, S.Pd mengapresiasi inisiatif Pemkot Baubau untuk melakukan penertiban.

â€ Tentunya ini menjadi hal yang sangat kami apresiasi dan berdampak baik terhadap semua proses pelaksanaan kegiatan dari penyelenggara KPU dan Bawaslu,â€ ungkapnya.

Terkait dengan APS, Sarmin mengakui sebenarnya sudah clear beberapa waktu lalu sebab pihak Bawaslu dan KPU bersama Pemkot Baubau sudah melakukan rapat koordinasi dan sekarang tinggal eksekusinya saja kapan akan dilakukan untuk penertiban APS.(*)

Pemkot Baubau Raih Peringkat Bergengsi Pada NCE ke-8

gan persnya Rabu (13/11/2024) mengatakan, National Cyber Exercise (NCE) 2024 merupakan bagian dari program kerja prioritas nasional BSSN ini berfokus pada peningkatan kemampuan keamanan siber peserta. Peserta berkompetisi untuk meningkatkan pengetahuan tentang penanganan serta pengelolaan insiden secara teknikal dan manajerial.

Dikatakan, acara ini dirancang untuk menguji kesiapan dan respons terhadap serangan siber melalui simulasi Cyber Drill. Keberhasilan Diskominfo Kota Baubau meraih peringkat 7 untuk tingkat instansi dalam Cyber Drill menjadi prestasi yang membanggakan, terutama karena bersaing dengan berbagai instansi besar dari Kementerian/Lembaga Negara, Perusahaan, Pemerintah Daerah Provinsi Kabupataen Kota, dan perguruan tinggi terkemuka. Cyber Drill adalah simulasi yang menguji kesiapan dan ketanggapan keamanan siber terhadap ancaman siber yang terus berkembang.

Sedangkan terkait dengan penghargaan yang diberikan oleh Universitas Gadjah Mada salah satu lembaga independen yang memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kota Baubau sebagai Pemerintah Kabupaten/Kota terbaik di Provinsi Sulawesi Tenggara dalam pelaksanaan transformasi digital, H Andi Hamzah mengakui, Ini tentu suatu prestasi yang tidak terlepas dari kerja keras dan kolaborasi semua terkhusus di bidang Persandian, bidang E-Gov, bidang TIK dan bidang PIK Diskominfo Kota Baubau dan seluruh stakeholder yang mendukung pencapaian ini juga terutama atas arahan, petunjuk dan bimbingan yang diberikan Pj Wali Kota Baubau, dengan selalu berpedoman pada Peraturan Badan Siber dan Sandi negara nomor 10 tahun 2019 tentang pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi di Pemerintah Daerah.

â€œKita berharap dengan prestasi ini kita dapat mempertahankannya dan ke depan bisa ditingkatkan lagi,”ujarnya.(*)

Prabowo Sudah Terima Salinan Surat Pengunduran Diri Sahbirin Noor

Presiden Prabowo telah menerima salinan surat pengunduran diri Sahbirin Noor alias Paman Birin sebagai Gubernur Kalimantan Selatan.

Laporan: Hadi

JAKARTA- Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri Sahbirin Noor alias Paman Birin sebagai Gubernur Kalimantan Selatan pada Rabu (13/11).

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebut salinan surat tersebut sudah diterima Prabowo dalam bentuk digital, sedangkan surat fisik masih dalam perjalanan.

"Softcopy surat pengunduran diri beliau ke Presiden dengan ditembuskan juga ke Mendagri sudah diterima. Surat fisiknya sedang dalam perjalanan," kata Hasan dalam keterangannya, Rabu (13/11).

Bertalian dengan itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera menunjuk Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Kalimantan Selatan.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menjelaskan Kemendagri tidak bisa menunjuk Wakil Gubernur Muhidin untuk menjadi Pjs Gubernur. Sebab, ia sedang maju jadi calon gubernur pada Pilkada Kalsel 2024.

"Akan ditunjuk segera Pjs Gubernur karena Pak Wagubnya (Muhidin) maju Pilgub," ujar Bima Arya saat dikonfirmasi.

Muhidin yang berpasangan dengan Hanuryadi Sulaiman akan melawan pasangan Raudatul Jannah dan Akhmad Rozanie Himawan. Raudatul Jannah atau Acil Odah merupakan istri dari Paman Birin.

Paman Birin dan enam orang lainnya sebelumnya ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya di Provinsi Kalsel tahun 2024-2025.

Enam tersangka dalam kasus itu sudah ditahan, tapi Paman Birin sempat buron dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) KPK.

Belakangan, Paman Birin mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Pada Selasa (12/11), hakim tunggal PN Jaksel mengabulkan praperadilan Paman Birin dan menggugurkan status tersangka padanya.

Sehari berselang, ia mengajukan pengunduran diri sebagai Gubernur Kalimantan Selatan. Paman Birin pun berpamitan kepada pegawai di Pemprov Kalsel.(*)

Lemhannas Minta Tambah Anggaran Rp99 M, Termasuk Buat Kunker ke Eropa

Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) mengusulkan tambahan anggaran untuk 2025 hingga Rp99 miliar dalam rapat kerja di Komisi I DPR, Rabu (13/11).

JAKARTA- Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) mengusulkan tambahan anggaran untuk 2025 hingga Rp99 miliar dalam rapat kerja di Komisi I DPR, Rabu (13/11).

Gubernur Lemhannas, TB Ace Hasan Syadzily mengungkap usul kenaikan anggaran itu akan digunakan untuk sejumlah kegiatan baru. Mulai dari studi banding ke Eropa dan Amerika, pelatihan, hingga Lemhannas goes to campus.

"Kami memerlukan penambahan anggaran sebesar Rp99.202.864.000. Jadi tidak besar juga sebetulnya penambahannya. Guna merealisasikan program-program Lemhannas di tahun 2025," kata Ace dalam rapat.

Ace mengatakan bahwa alokasi anggaran untuk Lemhannas dalam 10 tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. Anggaran lembaga tersebut tak kunjung kembali normal sejak pandemi Covid-19 pada 2020 lalu.

Ace mengungkap total alokasi anggaran untuk Lemhannas di 2025 sebesar Rp187.075.848.000. Dia meminta kenaikan anggaran Rp99 miliar untuk mendukung sejumlah program.

Pertama, studi banding ke beberapa negara maju seperti Eropa dan Amerika. Selama ini, studi banding yang dilakukan Lemhannas menurutnya hanya dilakukan di kawasan ASEAN. Menurut dia, Indonesia saat ini perlu melakukan kunjungan ke negara yang lebih maju.

"Untuk mendukung program pendidikan pimpinan tingkat nasional sebesar Rp29.555.747.000. Di antaranya kegiatan studi strategis luar negeri yang selama ini hanya dilaksanakan di kawasan ASEAN," kata dia.

"Pemilihan tempat tersebut didasarkan pada perkembangan globalisasi dan geopolitik yang dinamis di Eropa dan Amerika yang perlu dipelajari oleh para peserta guna persiapan menjadi calon pimpinan nasional," imbuh Ace.

Menko PMK Pratikno Puji Posko 'Lapor Mas Wapres' Gibran

Kedua, kenaikan anggaran itu akan digunakan untuk pelatihan pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Untuk kegiatan itu, pihaknya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp33.452.168.000.

Lemhannas, menurut dia, akan melakukan kegiatan di kampus yang akan akan menyasar generasi milenail. Rencananya Lemhannas goes to campus akan digelar di enam provinsi dengan masing-masing peserta setiap provinsi sebanyak 600 orang.

"Selain itu, anggaran yang diusulkan juga akan digunakan untuk mendukung program Lemhannas Goes to Campus dan Dialog Kebangsaan 600 orang per provinsi dengan total 6 provinsi," ujar Ace.

Ketiga, pihaknya akan melakukan program kajian strategis dengan alokasi anggaran sebesar Rp26.836.394.000. Kajian tersebut meliputi kajian krisis, rakor krisis, dan pengadaan buku kajian.

"Tujuan utama dari kajian krisis adalah untuk mempersiapkan dan memperkuat kapasitas organisasi atau pemerintah," katanya.

Terakhir, Ace menyebut pihaknya akan memperbaiki metodologi pengukuran ketahanan nasional. Untuk program tersebut, Lemhannas memerlukan jumlah anggaran sebesar Rp9.358.555.000.

"Kami akan terus memperbaiki metodologi pengukuran ketahanan nasional guna menghasilkan indeks ketahanan nasionaly-ang dapat dilihat secara real-time langsung oleh Presiden," katanya.

"Untuk itu, tentu dengan segala hormat, kami mohon dukungan dari para anggota Komisi I dalam pemenuhan anggaran Lemhannas terkait dengan program di atas," katanya.(*)

Mensesneg Buka Suara soal Posko 'Lapor Mas Wapres' Gibran

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyambut baik pembukaan posko 'Lapor Mas Wapres' oleh Gibran Rakabuming Raka.

JAKARTA-Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyambut baik pembukaan posko 'Lapor Mas Wapres' oleh Gibran Rakabuming Raka.

Ia menyebut pemerintahan Prabowo-Gibran hendak mendengarkan dan membuka saluran komunikasi pemerintah dengan masyarakat.

"Bagi kami itu semangat yang baik. Pemerintahan ini ingin mendengarkan semua, membuka sekat-sekat komunikasi pemerintah dengan masyarakat secara langsung," kata Pras di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (13/11).

Prasetyo mengatakan mereka terus mencoba menjajaki seluruh mekanisme untuk membuka saluran antara pemerintah dengan pemerintah.

Ia pun menyinggung instruksi Prabowo yang meminta jajarannya untuk meninggalkan hal yang bersifat feodalistik dan birokratis yang berbelit.

"Karena beban masalah masyarakat tidak direspons dengan cepat. Saya kira semangatnya bagus sekali," ujarnya.

Wapres Gibran menginisiasi posko pengaduan 'Lapor Mas Wapres' di Istana Wapres, Jakarta. Posko itu dibuka sejak Senin (11/11) lalu.

Masyarakat silih berganti berdatangan dan membuat pelaporan atas permasalahan yang dialami.

Pada hari pertama tercatat sebanyak 55 orang melaporkan permasalahan mereka ke posko pengaduan.

Deputi Administrasi Sekretariat Wakil Presiden Sapto Harjono menyebut pengaduan yang disampaikan masyarakat bermacam-macam.

Ia menjelaskan usai menerima laporan, Setwapres akan mempelajari permasalahan yang dialami pelapor. Lalu, Setwapres akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga hingga Pemda terkait yang dinilai membawahi permasalahan tersebut.(*)

Begini Pesan Pj. Gubernur Sultra ABR Melalui Sekda Sultra pada Rakorda Baznas Provinsi

SULTRA, BP- - Mewakili Pj. Gubernur, Komjen Pol. (P) Dr (H.C) Andap Budhi Revianto.,S.I.K.,M.H, Sekda Sultra, Drs. H Asrun Lio.,M. Hum.,Ph.D memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Daerah Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sultra, Selasa malam (12/11/2024), di Kendari.

Dalam Rakorda yang juga dihadiri oleh Pimpinan Baznas RI, Rizaludin Kurniawan, Pj Gubernur melalui Sekda Sultra turut menyampaikan sejumlah pesan dan harapan.

"Mengawali sambutan pada malam yang berbahagia ini, terlebih dahulu saya menyampaikan salam takzim dari Bapak Pj. Gubernur Sultra. Sekiranya beliau sangat berkenan untuk hadir bersama kita pada acara yang membanggakan ini, namun karena tugas kedinasan yang tidak dapat diwakilkan, beliau menugaskan saya, Sekda Sultra, untuk mewakili beliau pada kesempatan berbahagia ini," tutur Asrun Lio.

Sekda Sultra melanjutkan, Pj. Gubernur menyambut baik kegiatan Rakorda Baznas Provinsi Sultra Tahun 2024 ini. Diharapkan, dengan terlaksananya kegiatan ini, baznas dapat merumuskan langkah-langkah strategis dalam mengoptimalkan penghimpunan dan penyaluran zakat, serta merencanakan program pemberdayaan masyarakat yang dapat menciptakan perubahan yang positif.

"Kita ketahui bersama, bahwa zakat merupakan salah satu dari lima Rukun Islam yang menjadi pokok ajaran dasar dalam islam, selain syahadat, sholat, puasa, dan haji. Rukun ini menunjukkan betapa pentingnya zakat dalam kehidupan seorang muslim, yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat tertentu, baik secara finansial maupun status sosial," katanya lagi.

Dia mengingatkan kembali, jika zakat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan umat islam. Lebih dari sekadar kewajiban agama, zakat juga merupakan instrumen sosial yang dapat mengurangi kemiskinan, memperkecil kesenjangan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan umat.

Oleh karena itu, masih dia, pengelolaan zakat harus dilakukan secara inklusif dan berorientasi pada penanggulangan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Melalui sinergi pengelolaan zakat inklusif, kita dapat menciptakan sistem pengelolaan zakat yang lebih terstruktur dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan setiap peluang yang ada, baik dalam penghimpunan zakat, penyaluran, maupun pemberdayaan mustahiq. Ini adalah bagian dari upaya kita untuk menjadikan zakat sebagai bagian dari solusi nyata dalam menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat," pesan Pj Gubernur melalui Sekda Sultra.

Melalui kegiatan ini, katanya lagi, semoga dapat menggugah nurani kesadaran semua umat muslim, agar bertekad dengan niat Lillahi Taâ€™ala untuk memajukan baznas dalam mengemban misi yang diamanahkan oleh agama dan pemerintah.

Menurutnya, sebagai lembaga yang diberi amanah untuk mengelola zakat, Baznas memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa setiap dana zakat yang dihimpun digunakan sebaik- baiknya, tepat sasaran, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Sejarah mencatat dengan tinta emasnya bahwa dalam sejarah islam, terutama pada masa kepemimpinan Khalifah Umar Bin Abdul Aziz. Era kepemimpinan beliau dipandang sebagai era kejayaan pengelolaan zakat, karena beliau berhasil mengentaskan kemiskinan secara absolut, tetapi karena beliau berhasil membangun pengayoman sosial yang kuat. Sebagai kepala negara yang terkenal akan kesederhanaan, kejujuran, dan keadilannya, beliau menjamin kehidupan fakir miskin dan golongan yang membutuhkan, sehingga setiap fakir miskin merasa malu untuk menampakkan kemiskinannya, karena kehidupan mereka telah terjamin," jelasnya.

Melalui kisah itu, sambungya lagi, pola tersebut perlu dicontoh dan adaptasi dengan cara yang kreatif dalam pengelolaan zakat di zaman modern ini. Zakat, infaq, dan shadaqah yang dikumpulkan harus tidak hanya difokuskan pada bantuan bersifat sementara, tetapi juga pada pemberdayaan yang berkelanjutan.

"Oleh karena itu, lembaga pengelola zakat harus bekerja dengan sungguh-sungguh untuk memberikan jaminan perlindungan dan pemberdayaan bagi fakir miskin dan asnaf mustahiq lainnya. Sebagai langkah konkrit dalam memastikan bahwa zakat yang dikelola dapat membantu saudara-saudara kita untuk keluar dari kemiskinan dan membangun kehidupan yang lebih baik," tuturnya.

Sekda Sultra juga mengatakan, dalam menjalankan pengelolaan zakat, kebijakan operasional baznas harus sejalan dengan garis kebijakan pemerintah. Sebagai lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, baznas harus memahami bahwa rumahnya adalah pemerintah daerah dan kementerian agama.

"Kerjasama antara baznas, pemerintah daerah, dan lembaga terkait lainnya sangat penting agar pengelolaan zakat dapat berjalan secara efektif dan memberi dampak yang optimal bagi masyarakat," terangnya.

Sekda mengungkapkan, bahwa Pak Andap sejak awal menerima amanah sebagai penjabat gubernur sulawesi tenggara, Pj Gubernur memiliki harapan agar provinsi yang dicintai ini dapat menerapkan sistem tata kelola pemerintahan yang berbasis digital. Dengan dasar itu, dirinya percaya bahwa Sultra bisa menjadi lebih maju, modern, dan sejahtera.

"Sebagai bentuk dukungan terhadap program pengelolaan dana zakat untuk umat, pada Bulan Maret tahun 2024, pemerintah provinsi sulawesi tenggara telah meluncurkan sistem pembayaran zakat berbasis digital yaitu aplikasi "bayar zakat", yang diharapkan dapat memperkenalkan teknologi sebagai solusi dalam mempermudah transaksi zakat di Sultra. Esensinya, di tengah kesibukan masyarakat yang semakin tinggi, aplikasi ini dapat membantu mempermudah pembayaran zakat dengan cara yang aman, mudah, dan sesuai dengan prinsip syariah islam. kami berharap fasilitas digital ini dapat terus digunakan dan dikembangkan," kata Sekda menyampaikan ungkapan Pj Gubernur Sultra.

Sehingga, lanjutnya, partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat dapat meningkat dan mempermudah pengelolaan zakat oleh baznas.

Sebelum mengakhiri sambutannya, Pj Gubernur melalui Sekda Sultra mengajak semua pihak untuk bersama-sama bekerja keras dengan niat yang tulus memajukan pengelolaan zakat di sulawesi tenggara, agar zakat dapat menjadi solusi dalam pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Pimpinan Baznas RI, Rizaludin Kurniawan, Ketua DPRD Provinsi Sultra, Forkopimda Provinsi Sultra, Pimpinan KlL yang berada di Sultra atau yang mewakili, dan Direktur Pengumpulan Zakat Baznas RI.

Selanjutnya, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Sultra selaku Anggota Dewan Pembina Baznas Provinsi Sultra, Pimti Pratama Pemprov Sultra mulai dari Sahli Gubernur, Asisten Sekda, Inspektur, Kadis, Kaban dan Karo Setda, Ketua Baznas Provinsi Sultra beserta seluruh jajaran, para Ketua Baznas kabupaten kota se Sultra, pimpinan LAZ Nasional Provinsi Sultra, peserta rakor Baznas Provinsi Sultra, dan berbagai pihak terkait lainnya.(*)

Pemkab Muna Menunggak di BPJS Kesehatan Rp7,8 Miliar??

Pewarta: Amran

MUNA, BP- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna saat ini dikabarkan masih memiliki sejumlah kewajiban yang belum dituntaskan kepada pihak ketiga. Di antaranya, tunggakan di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar Rp7,8 miliar.

Terkait hal ini, Kasubag Pengelola Keuangan dan Aset, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Muna, Asis Bainuddin yang dikonfirmasi tak menampik hal tersebut.

Kata Asis, tunggakan BPJS Pemkab Muna dari Juni hingga November 2024 yang belum dibayarkan sebesar Rp7,8 miliar.

"Baru-baru ini kita sudah ajukan SPM untuk permohonan pembayaran tunggakan BPJS bulan Juni 2024. Kita ajukan ke BKAD Muna untuk dibayarkan, tapi sampai akhirnya batal dibayarkan oleh pihak BKAD Muna,â€ ungkap Azis pada awak media, Kamis 13 November 2024.

Azis menyebut, pelayanan BPJS Kesehatan di Kabupaten Muna menggunakan status non cut off atau tidak ada masa tunggu keaktifan peserta BPJS.

"Dalam perjanjian kerja sama dengan BPJS, kita sudah non cut off, artinya kita urus hari ini aktif hari ini juga. Tapi non cut off ini ada syaratnya, kita tidak punya tunggakan dan lancar pembayarannya,â€ terang Azis.

Saat ditanya apakah tidak adanya dana ataukah ada hal lain yang menjadi penyebab sehingga tunggakan BPJS Kesehatan Pemkab Muna ini belum terbayar, Azis menjawabnya diplomatis.

"Ada uang tapi tehnisnya dapat ditanyakan di BKAD Muna. Kita disini hanya buat SPM saja dan dibawakan ke BKAD Muna,â€ ujarnya.

Tunggakan utang yang membebani Pemkab Muna ternyata tidak hanya di BPJS Kesehatan saja. Informasi yang berhasil dihimpun, utang Pemkab Muna dengan pihak ketiga juga ada sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) sebesar Rp38 miliar.(*)

Sa'al Musrimin Haadi dari PDIP Resmi Dilantik jadi Ketua DPRD Buteng

Pewarta: Burhan

BUTENG, BP-Sa'al Musrimin Haadi resmi dilantik sebagai Ketua Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Tengah (Buteng) untuk masa jabatan 2024-2029. Bersama dengan Sa'al, turut dilantik Mazaluddin dari Partai Nasdem sebagai Wakil Ketua I dan Rusli dari Partai Gerindra sebagai Wakil Ketua II.

Pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan ketiga pimpinan DPRD ini dilakukan dalam Rapat Paripurna di ruang Rapat DPRD Buteng pada Rabu (13/11/2024).

Pelantikan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Pengadilan Pasarwajo, Ivan Budi Hartanto, serta dihadiri oleh Pj Bupati Buton Tengah, Kostantinus Bukide, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Anggota DPRD Buteng periode 2024-2029, para Kepala OPD, Camat, Lurah/Kepala Desa, sejumlah tamu undangan lainnya.

Dalam sambutan perdana sebagai Ketua DPRD Buteng definitif, Sa'al Musrimin Haadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang telah diberikan kepada dirinya dan kedua wakilnya untuk mengemban amanah sebagai pimpinan DPRD.

"Kami menyadari bahwa jabatan ini bukanlah hadiah, melaingkan sebuah amanah dan kepercayaan sekaligus tanggung jawab yang sangat berat. Kami akan menjalankan tugas ini dengan integritas, komitmen, dan dedikasi untuk kepentingan rakyat dan kemajuan daerah kita",ujarnya.

Ia menegaskan, pentingnya kolaborasi untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Buton Tengah.

"Dengan kerjasama dan dukungan dari seluruh pihak, kami yakin kita mampu memastikan bahwa setiap kebijkan yang dihasilkan berpihak kepada kepentingan bersama demi kesejahteraan masyarakat Buteng",tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Pj Bupati Buton Tengah, Kostantinus Bukide, memberikan ucapan selamat kepada ketiga pimpinan DPRD yang baru saja dilantik.

"Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah, kami mengucapkan selamat kepada saudara, Sa'al Musrimin Haadi sebagai Ketua DPRD Buteng, Mazaluddin, dan Rusli masing-masing sebagai Wakil Ketua. Kami yakin bahwa ketiga pimpinan ini memiliki kapasitas untuk menjalankan amanah dengan baik dan penuh tanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan",ujarnya.

Ia berharap dengan pelantikan pimpinan DPRD Buteng masa jabatan 2024-2029 ini, lembaga DPRD Buteng akan semakin solid dalam menjalankan tiga fungsi utamanya, yakni fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, sebagaimana diamanatkan oleh UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Lebih lanjut, Pj Bupati Mengajak Jajaran pimpinan dan anggota DPRD untuk menjalin sinergi yang kuat dengan pemerintah daerah guna melahirkan berbagai kebijakan yang berpihak pada rakyat, mempercepat pembangunan, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Buton Tengah.

Dalam rangka menyambut Pilkada serentak 2024 yang tinggal dua 14 hari lagi, Pj Bupati berharap agar seluruh pimpinan dan anggota DPRD Buteng ikut serta dalam menjaga kelancaran proses Pilkada hingga pelantikan kepala daerah terpilih nantinya.

"Suksesnya penyelenggaraan Pilkada adalah tanggung jawab kita bersama, baik pemerintah maupun masyarakat. Sudah sepatutnya kita menjaga dan merayakan pesta demokrasi ini dengan penuh riang gembira",tutupnya. (*)

Dinkes Buton Kerjasama Dengan Dinas Pendidikan Gelar Program Aksi Bergizi

Pewarta: Rahim

BUTON, BP-Pemerintah Kabupaten Buton, melalui Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, menggelar program Aksi Bergizi sebagai langkah strategis percepatan penurunan angka stunting. Kegiatan ini berlangsung di SMPN 08 Buton di Pasarwajo, Kamis pagi, 24 Oktober 2024.

Program Aksi Bergizi ini dirangkaikan dengan implementasi proyek perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Aksi Strategis Pelayanan Integrasi Kesehatan Sekolah â€œAsyik Schoolâ€ yang diinisiasi oleh Kepala Dinas Kesehatan Buton, Syafaruddin, S.KM., M.Kes. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan siswa sekolah, khususnya dalam upaya pencegahan stunting.

Dalam acara tersebut, para siswi mendapatkan tablet penambah darah setelah sebelumnya menerima sarapan gratis, sebagai bagian dari edukasi gizi yang dikombinasikan dengan pemberian suplemen untuk mendukung kesehatan mereka.

Sekretaris Daerah Kabupaten Buton, Asnawi Jamaluddin, S.Pd., M.Si., yang mewakili Pj. Bupati Buton dalam sambutannya, menyampaikan bahwa Pemkab Buton mendukung penuh program Aksi Bergizi dan Asyik School. â€œKami berharap agar para remaja putri secara rutin mengonsumsi tablet penambah darah setiap minggunya. Langkah ini diharapkan dapat mencegah stunting dan menghasilkan generasi muda yang sehat, cerdas, dan siap menghadapi tantangan masa depan,â€ ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Buton, Syafaruddin, S.KM., M.Kes., menjelaskan bahwa tujuan umum dari program ini adalah meningkatkan status kesehatan anak sekolah dan menciptakan lingkungan sekolah yang sehat. â€œTujuan khususnya adalah meningkatkan literasi warga sekolah tentang pentingnya konsumsi tablet penambah darah, olahraga, dan asupan gizi yang cukup. Semoga dengan Aksi Bergizi, komitmen lintas sektor dapat terus diperkuat untuk keberlanjutan program ini,â€ jelasnya.

Acara ini turut dihadiri oleh Pj. Ketua TP PKK Kabupaten Buton, Ny. Wa Ode Naharia, S.PKP., M.M., Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Buton, Ny. Kiki Amalia, serta sejumlah Kepala OPD, anggota TP PKK, dan DWP Kabupaten Buton. (*)

Dinas PPKB BUton Gelar Penguatan Kampung Keluarga Berkualitas

BUTON, BP-Pemerintah Kabupaten Buton melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buton mengadakan kegiatan Operasional Penguatan Kampung Keluarga Berkualitas (KB) tingkat Kabupaten Buton tahun 2024 di Aula Kantor Bupati Buton, Kamis, 17 Oktober 2024

Pj. Bupati Buton dalam hal ini diwakili Staf Ahli Bupati Buton Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, H. Abdul Rais, SP mengatakan sampai dengan saat ini Buton memiliki 95 Kampung KB sesuai jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Buton.

"Kehadiran Kampung KB ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat desa melalui program kependudukan dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor lain dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas," ungkapnya.

Dikatakanya, pada tahun 2020 kampung Keluarga Berencana berubah nama menjadi kampung keluarga berkualitas, perubahan ini diharapkan mampu mengukur indikator keberhasilan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana atau bangga kencana

"Arah kebijakan penyelenggaraan kampung berkualiats sesuai instruksi presiden ini bertujuan menjamin terselenggarnya pembangunan keluarga dalam suluruh dimensinya meliputi dimensi fisik sosial budaya maupun ekonomi secara holistik dan terpadu," ucapnya.

Oleh karena itu, lanjut Sahli Bupati Buton, penguatan peran pemerintah daerah dalam optimalisasi penyelenggaraan kampung KB sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas SDM dan pemberdayaan serta pemperkuat institusi keluarga

"Pembentukan kampung KB prioritasnya adalah percepatan penurunan stunting, pemberdayaan ekonomi keluarga, pelayanan KB dan kesehatan dan penanggulangan persoalan sosial lainnya," tutupnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini Forkopimda kabupaten Buton, kepala OPD lingkup Pemkab Buton, Para Camat, Para Kepala Desa/Lurah se Kabupaten Buton. (*)

Kapolri Janji Utamakan Mediasi Jika Ada Orang Tua Murid Laporkan Guru

Kapolri Jenderal Listyo Sigit janji mengedepankan mediasi demi menghindari kriminalisasi terhadap guru yang mendisiplinkan siswa.

Laporan: Hadi

JAKARTA- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo janji bakal mengedepankan proses mediasi dalam kasus-kasus pendisiplinan siswa oleh guru.

Ia mengatakan upaya mediasi dilakukan untuk mencegah kriminalisasi terhadap guru oleh orang tua murid yang merasa tidak terima dengan pendisiplinan tersebut.

"Untuk memberikan ruang mediasi atau restorative justice terhadap pengaduan yang dilakukan oleh orang tua murid, yang tentunya kita harapkan bisa dimulai dengan proses mediasi terlebih dahulu," ujar Listyo di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (12/11).

Hari ini, ia menerima kedatangan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti di Gedung Rupatama Mabes Polri.

Listyo berharap upaya mediasi bisa membuat para guru juga lebih tenang dan tidak lagi khawatir saat mengajar dan menjalankan program pendidikan terhadap para murid.

"Membuat guru juga lebih nyaman terkait dengan program-program yang kaitannya dengan masalah kedisiplinan," tuturnya.

Namun, ia meminta guru agar rutin berkoordinasi dengan orang tua murid terkait program kedisiplinan yang akan diterapkan di sekolah.

"Program kedisiplinan seperti apa disampaikan ke orang tua murid kemudian sama-sama bisa saling paham," jelasnya.

Baru-baru ini, ramai kasus dugaan kekerasan terhadap anak yang dilakukan guru honorer SD Negeri 4 Baito, Supriyani. Kasus itu bergulir hingga ke pengadilan.

Supriyani didakwa melakukan kekerasan terhadap siswa berinisial CD (8). Siswa itu merupakan anak dari Apida Hasyim Wibowo, Kepala Unit Intelijen Polsek Baito.

Menurut jaksa penuntut umum (JPU), Supriyani melakukan kekerasan dengan cara memukul CD dengan gagang sapu ijuk. Akibat kekerasan itu, korban disebut mengalami luka lecet dan memar.

Supriyani sejak awal membantah tuduhan itu. Sejumlah keterangan saksi juga tak bisa membuktikan kekerasan itu terjadi.

Saat kasus berjalan, ada dugaan permintaan 'uang damai' Rp50 juta oleh polisi kepada Supriyani. Selain itu, juga ada seseorang yang mengaku dari pihak Perlindungan Perempuan Anak menginformasikan bahwa Kejari Konawe Selatan meminta duit Rp15 juta supaya Supriyani tak ditahan.

Kini, JPU menuntut bebas Supriyani dari seluruh dakwaan. Jaksa mengatakan tindakan Supriyani memukul korban bukan suatu tindak pidana.(*)

Kandidat Vaksin TBC di Indonesia

BALI-Pemerintah Indonesia telah mengidentifikasi beberapa produsen vaksin terkemuka di berbagai negara untuk mengembangkan vaksin Tuberkulosis (TBC).

Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat program pengendalian TBC di Indonesia, mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia.

"Ada 3 kandidat vaksin TBC yang kita dekati, ketiganya berasal dari negara yang berbeda,â€ kata Menkes di Bali, Senin (11/11).

Kandidat vaksin pertama adalah vaksin TB yang dikembangkan oleh Yayasan Bill & Melinda Gates dan GlaxoSmithKline (GSK) asal Amerika Serikat. Vaksin ini dikembangkan dengan memanfaatkan protein rekombinan.

Kandidat vaksin kedua dikembangkan melalui kerja sama perusahaan farmasi asal Tiongkok, CanSino, dan perusahaan biofarmasi asal Indonesia, Etana. Pengembangan vaksin ini menggunakan teknologi viral-vector dan sedang dalam uji klinis fase pertama.

Kandidat vaksin ketiga dikembangkan oleh perusahaan bioteknologi asal Jerman, BioNTech, dan perusahaan farmasi asal Indonesia, Biofarma. Pengembangan vaksin ini menggunakan teknologi mRNA.

"Kami juga akan berkontribusi untuk mengikuti proses uji klinis dari ketiga produsen vaksin TB tersebut,â€ ucap Menkes.

Lebih lanjut, Menkes mengatakan, vaksin yang dikembangkan ini akan diperuntukkan bagi anak-anak dan dewasa. Selain itu, vaksin juga akan diperuntukkan bagi mereka yang belum terinfeksi maupun sudah terinfeksi virus TBC.(*)

Mendikdasmen Abdul Mu'ti mengaku masih mengkaji model sekolah untuk anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

Mendikdasmen Kaji Model Sekolah untuk Korban Kekerasan Seksual

Laporan: Yeti

JAKARTA- Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengaku masih mengkaji model sekolah untuk anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

Abdul menjelaskan pengkajian itu dilakukan pihaknya menyusul rencana pembukaan sekolah khusus untuk anak-anak korban kekerasan seksual.

Ia mengatakan kebutuhan sekolah khusus itu sangat penting lantaran sering kali mereka yang menjadi korban kekerasan seksual justru dikeluarkan dari sekolah. Sehingga, para korban dinilai malah mengalami beban yang berlipat.

"Pertama adalah beban karena dia sudah dikeluarkan dari sekolah dan kedua adalah beban dia juga punya masalah dengan apa yang terjadi pada dirinya," ujarnya usai bertemu Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri, Selasa (12/11).

Abdul mengatakan ada dua opsi yang sedang dikaji pemerintah untuk korban kekerasan seksual. Opsi pertama yakni dengan meniru penerapan sekolah khusus yang dikembangkan di Amerika.

Opsi kedua yakni melalui boarding school seperti yang sudah diterapkan belakangan ini. Abdul mengatakan nantinya kajian itu dilakukan secara mendalam guna meminimalisasi masalah baru setelah pendirian sekolah khusus.

"Sehingga harus ada jalan keluar supaya mereka tetap ingin belajar dan mereka harus kita berikan kesempatan untuk bisa tumbuh sebagai generasi bangsa yang kuat dengan pendidikan yang kita berikan itu," jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengatakan pemerintah berencana membuat sekolah khusus bagi siswa korban kekerasan seksual.

Rencana tersebut disampaikan setelah ia menghadiri acara Rakornas evaluasi kebijakan pendidikan untuk tingkat dasar dan menengah di Sheraton Gandaria, Jakarta, Senin (11/11).

"Kemarin sudah-sudah kami bahas dengan Pak Menteri (Abdul Mu'ti) bagaimana anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan lain-lain ini harus mendapatkan atensi khusus. Jangan sampai mereka malah dikeluarkan dari sekolah," ujarnya.

Jika Anda mengalami, melihat, mendengar, dan mengetahui tindak kekerasan atau pun pelecehan kepada perempuan dan anak, hubungi SAPA via telepon 129 atau melalui WhatsApp 08111-129-129.(*)

Harian Pagi
Baubau Post
Kritik, Lugas, Independen

Wartawan Baubau Post tidak menerima Imbalan dalam bentuk apa pun saat melakukan tugas jurnalistik

Dalam pelaksanaan tugas, wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post

Segala Berita yang diterbitkan oleh Baubau Post merupakan tanggungjawab penanggungjawab Redaksi

Pemimpin Umum : Fauzan NWA
Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi : Ardi
Redpel : Hengky TA
Korlip : Hengky T.A
Redaktur : Alyakin, Kasrun
Reporter : Rahman, ,mashuri, Jaya, Azis, , Lisna

Layouter : RIrin
Pracetak : Aditya
Cetak : Jamal

Penerbit : PT. Faren Grafika
Komisaris : Erna Agule
Direktur Utama : Andina Latief, SKM
Manager Keuangan : Nabila D.A
Manager Iklan dan Pemasaran : Fauzan
Kepala Sirkulasi : Jamal
Administrasi : Salvana
Security :

Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl. Raya Palagimata, BTN Palagimata, Blok K-L No. 1 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari Kota Baubau
Tlp. 0402-2814207 - Email : baubaupostt2019@gmail.com
Percetakan : PT. Faren Grafika, Alamat: Jl. Raya Palagimata Blok K No 01, Kel. Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau

Kepala Biro Wakatobi : Risman
Kepala Biro Buton Utara : Fauzan
Kepala Biro Buton : **Rahman**
Kepala Biro Busel : Salvana
Kepala Biro Buteng : Andini
Kepala Biro Bombana : _
Kepala Biro Sultra : _

Kontributor Baubau : Iphul, **Kontributor Sultra** : Amat Jr ,**Kontributor Buton** : **Kontributor Butur** : Kasrun, **Kontributor Buteng : Hengki TA, Kontributor Busel** : Amirul

Baubau : Jaya
Agen Pasarwajo :
Agen Butur : Samrihan

Harga Langganan : Dalam Kota Baubau Rp. 100.000,-/ bulan, Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim, Eceran Dalam Kota Baubau : Rp.5.000,-

Jaksa Agung Buka-bukaan soal Dikepung Brimob hingga Pegawai Main Judol

Jaksa Agung rapat di DPR buka-bukaan soal judol hingga pengepungan Brimob.

Laporan: Hamid

JAKARTA- Jaksa Agung, ST Burhanuddin mengungkap bahwa ada lima pegawainya yang kedapatan main judi online. Menurut Burhanuddin, mereka kini sudah diserahkan ke bidang pengawasan untuk ditindaklanjuti.

"Jujur aja ada pegawai yang ikut dan hanya iseng-iseng aja di bawah Rp5 ribuan begitu, dan kami sudah menyerahkan nama-nama itu ke bidang pengawasan untuk tindak lanjuti," kata Burhanuddin dalam rapat di Komisi III DPR, Rabu (13/11).

Pada kesempatan itu, dia juga mengumumkan progres penanganan kasus judi online yang menjerat sejumlah pegawai di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Burhanuddin mengungkap bahwa saat ini kasus tersebut belum masuk ke pihaknya untuk masuk ke proses pengadilan. Kasus tersebut saat ini masih di kepolisian dalam tahap penyidikan.

"Untuk judi online, judi online, kami memang belum belum nyampe ke kami, karena kami di era penuntutan penyidikan masih di Mabes Polri," kata dia.

Polda Metro Jaya telah menetapkan 15 orang tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan wewenang untuk menutup situs judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Dari 15 tersangka ini, 11 di antaranya merupakan pegawai Komdigi. Sementara tiga diantaranya merupakan AK, AJ, dan A yang bertugas mengendalikan operasional 'kantor satelit'.

Teranyar, polisi kembali menangkap dua tersangka baru dalam kasus ini. Kedua tersangka ini masing-masing berinisial MN dan DM.

Tersangka MN masuk salah satu daftar pencarian orang (DPO) hasil dari pengembangan 15 tersangka sebelumnya. Sementara DM, merupakan hasil pengembangan dari tersangka MN.

Burhanuddin juga mengakui kantor Kejagung sempat dikepung oleh sejumlah oknum Brimob Polri saat ramai isu penguntitan Jampidsus Kejagung Febrie Ardiansyah oleh anggota Densus 88 Polri.

"Terkait pengepungan Kejaksaan Agung dilakukan, jujur aja, dilakukan oleh oknum Brimob," kata Burhanuddin.

Burhanuddin mengatakan Korps Ahdyaksa saat itu telah mengamankan sejumlah oknum Brimob yang melakukan pengepungan. Namun, Burhanuddin mengklaim tidak mengetahui tindaklanjut yang diambil Mabes Polri terhadap para oknum Brimob tersebut.

"Oknum Brimob yang tertangkap oleh kami, kami serahkan ke Mabes Polri dan kami tidak monitor lagi soal itu," jelas dia.

Sebelumnya, sebuah video sempat viral di media sosial menampilkan sejumlah anggota Brimob Polri tengah konvoi di sekitar Gedung Kejaksaan Agung di Jakarta Selatan.

Para personel Brimob itu pun terlihat mengenakan seragam lengkap disertai senjata laras panjang sembari berboncengan. Rotator serta suara sirine turut dinyalakan saat konvoi Brimob dilakukan.

Diberitakan sejumlah media, Ketut Sumedana yang saat itu masih menjabat sebagai Kapuspenkum Kejagung mengatakan aksi konvoi ini masih ada kaitannya dengan peristiwa penguntitan Jampidsus Kejagung Febrie oleh anggota Densus 88 Antiteror Polri. Di sisi lain Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho mengklaim konvoi yang dilakukan anggota Brimob itu merupakan patroli rutin.

"Patroli itu merupakan tugas kepolisian dan setiap hari dilaksanakan. Mungkin kalau ditanya ke teman-teman yang tinggal deket dengan batalyon brimob, pasti ada patroli tiap hari," ujar Sandi dalam jumpa pers di Mabes Polri, Kamis (30/5).(*)

Kejagung Pindahkan Penahanan Ibu Ronald Tannur ke Jakarta

Kejaksaan Agung (Kejagung) bakal memindahkan lokasi penahanan tersangka suap hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Meirizka Widjaja sekaligus ibu dari terpidana Gregorius Ronald Tannur.

Laporan: Hadi

JAKARTA- Kejaksaan Agung (Kejagung) bakal memindahkan lokasi penahanan tersangka suap hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Meirizka Widjaja sekaligus ibu dari terpidana Gregorius Ronald Tannur.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar menyebut penyidik memutuskan memindahkan Meirizka dari Surabaya ke Jakarta besok.

"Kamis, tersangka MW akan dipindahkan ke Jakarta," kata Harli kepada wartawan, Rabu (13/11).

Harli belum merinci lebih jauh soal di rutan yang akan ditempati Meirizka. Ia hanya menyebut, pemindahan penahanan berdasarkan kebutuhan penyidik.

"Untuk efektifitas penyidikan," ujarnya.

Sebelumnya Kejagung resmi menetapkan tiga hakim PN Surabaya yakni Erintuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul sebagai tersangka penerima suap dalam kasus vonis bebas pembunuhan Gregorius Ronald Tannur.

Pengacara Ronald Tannur Lisa Rahmat juga ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap. Dalam kasus ini penyidik menyita barang bukti uang tunai dalam berbagai pecahan senilai Rp20 miliar beserta sejumlah barang elektronik.

Terbaru, Kejagung juga turut menetapkan ibunda dari Ronald Tannur yakni Meirizka Widjaja sebagai tersangka pemberi suap. Meirizka diduga telah memberikan uang suap untuk ketiga hakim melalui Lisa sebanyak Rp3,5 M.

Dalam kasus ini, mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar sempat mengatur pertemuan antara pengacara Ronald Tannur, Lisa Rahmat dengan pejabat Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Abdul Qohar menyebut awalnya Lisa menghubungi Zarof untuk dikenalkan dengan sosok R selaku pejabat PN Surabaya.

Abdul mengatakan permohonan tersebut disampaikan Lisa dengan maksud dapat melobi R untuk memilih Majelis Hakim perkara Ronald Tannur seperti yang diinginkan.(*)

7 Tahanan Rutan Salemba Kabur, Salah Satunya Gembong Narkoba Murtala

Pewarta: Alwan

JAKARTA-Polisi mengungkapkan salah satu tahanan yang kabur dari Rumah Tahanan (Rutan) Salemba Kelas 1 Jakarta Pusat adalah gembong narkoba Murtala Ilyas.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan saat ini polisi masih mengejar tujuh tahanan yang melarikan diri tersebut.

"Benar, salah satunya adalah Murtala," kata Ade Ary saat dikonfirmasi, Rabu (13/11).

Polisi menangkap gembong narkoba Murtala cs jaringan Malaysia-Medan-Aceh-Jakarta pada Maret 2024 lalu. Dari Murtala cs, polisi menyita barang bukti narkoba jenis sabu seberat 110 kilogram.

Murtala merupakan residivis kasus narkoba yang sebelumnya pernah ditahan dan ditangkap juga dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) narkotika.

Diberitakan, tujuh tahanan dan narapidana kasus narkoba melarikan diri dari Rutan Salemba Kelas 1 Jakarta Pusat, Selasa (12/11) dini hari.

"Rutan Jakarta Pusat bersama jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan kepolisian melakukan pengejaran terhadap tujuh Tahanan dan Narapidana yang melarikan diri," kata Kepala Rutan Kelas I Jakarta Pusat Agung Nurbani dalam keterangan tertulis.

Agung menjelaskan ketujuh tahanan dan narapidana itu diduga melarikan diri dengan cara menjebol teralis besi kamar mandi. Setelahnya para narapidana melompat ke area luar kamar mandi dan langsung masuk menuju gorong-gorong atau saluran air.

"Lalu masuk ke gorong-gorong dan kembali menjebol teralis gorong-gorong menuju arah timur Rutan," jelasnya.(*)

DAFTAR PASANGAN CALON PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BUTON PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2024

1

CALON BUPATI
SYARASWATI

CALON WAKIL BUPATI
Drs. H. RASYID MANGURA, M.H.

PASANGAN CALON PERSEORANGAN

VISI

MEWUJUDKAN KABUPATEN BUTON YANG MANDIRI, MAJU, DAN BERDAYA SAING MELALUI OPTIMALISASI PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

MISI

1. MENINGKATKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN DAN BERDAYA SAING.
2. MENDORONG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG MENDUKUNG PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM.
3. MEMAJUKAN SEKTOR PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN DENGAN TEKNOLOGI MODERN.
4. MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.
5. MENGOPTIMALKAN PARIWISATA BERBASIS SUMBER DAYA ALAM DAN BUDAYA LOKAL.
6. MEMPERKUAT TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN DAN PARTISIPATIF.

2

CALON BUPATI
Drs. LA BAKRY, M.Si.

CALON WAKIL BUPATI
ARIS MARWAN SAPUTRA, S.H.

GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL

VISI

BUTON SEBAGAI KAWASAN BISNIS DAN BUDAYA TERDEPAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045

MISI

1. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ALAM (SDA) SAINS,TEKNOLOGI DAN TATA RUANG KAWASAN.
2. TRANSFORMASI PENDIDIKAN,KESEHATAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM).
3. KESETARAAN GENDER, PEMULA (GENERASI MILENIAL DAN GENERASI Z) DAN PENYANDANG DISABILITAS.
4. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, UMKM DAN INDUSTRI KREATIF
5. REFORMASI BIROKRASI, KESADARAN HUKUM DAN TRASPORTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH.
6. PERKUAT PENYELARASAN HUBUNGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN DAN PELESTARIAN BUDAYA.

3

CALON BUPATI
H. LA ODE NAANE

CALON WAKIL BUPATI
H. AKALIM, S.Pd.

GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL

VISI

TERWUJUDNYA BUTON SEBAGAI RUMAH BERSAMA YANG CERDAS, SEJAHTERA, BERDAYA SAING, MENGHARGAI PERBEDAAN DAN MEMILIKI JIWA GITONG ROYONG

MISI

1. MENCIPTAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNANCE, DENGAN DUKUNGAN TEKNOLOGI SERTA PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING BAGI MASYARAKAT BUTON SMART.
2. MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN YANG BERKUALITAS DAN TERJANGKAU MENUJU GENERASI BUTON EMAS.
3. MEMBANGUN EKONOMI YANG KREATIF DAN INOVATIF UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN.
4. MEMBANGUN SARANA DAN PRASARANA YANG MEMADAI UNTUK MENDUKUNG TERWUJUDNYA KABUPATEN BUTON YANG CERDAS (BUTON SMART CITY).
5. MENGUATKAN BUDAYA MASYARAKAT YANG SALING MENGHARGAI DAN JIWA GOTONG ROYONG.

4

CALON BUPATI
Drs. BASIRAN, M.Si.

CALON WAKIL BUPATI
LA ODE RAFIUN, S.Pd., M.Si.

PARTAI POLITIK PENGUSUL

VISI

BUTON MAJU_TERCIPTANYA MASYARAKAT BUTON YANG ADIL DAN MAKMUR DI TANDAI DENGAN MENINGKATNYA DERAJAT PENDIDIKAN DAN KESEHATAN SERTA KONDISI EKONOMI MASYARAKAT LEBIH BAIK. BUTON BERDAYA SAING_MASYARAKAT BUTON YANG MEMILIKI KEUNGGULAN KOMPETITIF UNTUK MENGHADAPI PERSAINGAN DI MASA YANG AKAN DATANG MENUJU INDONESIA EMAS 2024-2029

MISI

1. MENCIPTAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DENGAN DUKUNGAN TEKNOLOGI UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT.
2. MENINGKATKAN KUALITAS SUBERDAYA MANUSIA MELALUI PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN YANG BERKUALITAS DAN MUDA SERTA TERJANGKAU.
3. MEMBANGUN EKONOMI YANG KREATIF DAN INOVATIF DENGAN PERTIMBANGAN DAYA SERAP TENAGA KERJA PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN.
4. MENINGKATKAN KETAHANAN MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI BERBAGAI MACAM ANCAMAN DAN GANGGUAN BERLANDASKAN NILAI NILAI FALSAFAH DAN BUDAYA KEBUTONAN DENGAN MENJUNJUNG TINGGI NORMA KEAGAMAAN.
5. MEMBAGUN SARANA DAN PRASARANA DASAR YANG PRIORITAS UNTUK MENDUKUNG TERWUJUDYA DAERAH MAJU BAIK KUANTITAS MAUPUN KUALITAS
6. MENGIMPLEMENTASIKAN ADAT ISTIADAT DAN KEBUDAYAAN DAERAH DALAM MENAIKAN KARASITAS DAERAH.

5

CALON BUPATI
Dr. BERE ALI, M.Si.

CALON WAKIL BUPATI
LAODE MUHAMAD SUMARLIN BUCHARI, S.E.

GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL

VISI

BERLIAN MEWUJUDKAN BUTON YANG LEBIH BAIK

MISI

1. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SEBAGAI MODAL UTAMA PEMBANGUNAN.
2. PENUMBUHAN INVESTASI SEBAGAI SARANA PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA.
3. PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.
4. PENINGKATAN INFRASTRUKTUR SECARA MERATA.
5. PELAYANAN PUBLIK YANG SEMAKIN EFEKTIF DAN EFISIEN.

6

CALON BUPATI
ALVIN AKAWIJAYA PUTRA, S.H.

CALON WAKIL BUPATI
SYARIFUDIN SAAFA, S.T.

GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL

VISI

TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG RELIGIUS, SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERDAYA SAING MELALUI PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN (BUTON BERSINAR MAS)

MISI

1. MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE), SERTA MENDORONG TERCIPTANYA KEHIDUPAN BERMASYARAKAT YANG RELIGIUS, KONDUSIF DAN BERBUDAYA.
2. MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN DAN MENJAGA LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKUALITAS.
3. MENINGKATKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DAERAH YANG BERBASIS POTENSI LOKAL, MEMBUKA LAPANGAN KERJA DAN KESEMPATAN BERUSAHA SERTA MENGURANGI KEMISKINAN.